BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Namun permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak, hal ini jelas merugikan negara.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah di setujui masyarakat melalui perwakilannya didewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*,

dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan di lakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,kepercayaan,tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar **(Waluyo:2003).** Sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi **(Mardiasmo:2009).**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Wajib pajak disini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Selain menghitung dan membayar sendiri wajib pajak juga harus melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkannya, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena sistem ini sangat membutuhkan partisipasi yang besar dari wajib pajak diantaranya kesadaran, kejujuran serta tanggung jawab. Pelaksanaan pemungutan pajak pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan, banyak kendala yang dihadapi oleh fiskus yang pada akhirnya akan berdampak pada pemberian sanksi kepada Wajib Pajak.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak diperlukan dalam penerapan *self assessment system*, yang bertujuan agar penerimaan pajak yang optimal. **(Siti Kurnia Rahayu : 2010)**

Penelitian mengenai kepatuhan pajak merupakan topik yang senantiasa penting untuk dilakukan mengingat besarnya peran pajak dalam pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pada 2010 jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT turun dibanding tahun 2009. **(Liberti Pandiangan: 2011)**

Permasalahan wajib pajak dalam penyampaian SPT tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi wajib pajak disebabkan oleh banyak hal seperti besaran penghasilan, tingkat pendidikan, isu korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas, atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam perundang-undangan sehingga membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak **(Anshari Ritonga: 2010).**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam judul:

"**TINJAUAN ATAS PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA"**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Kepatuhan wajib pajak dalam penerapan *Self Assesment System* masih sangat rendah.
2. Kurang pahamnya wajib pajak dalam penerapan *Self Assesment System*.

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka telah timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi pada penerapan *Self Assesment System* di KPP Pratama Bandung Tegallega ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Self Assesment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penerapan *Self Assesment System* di KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.5 lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan tabel berikut :

No	Kegiatan	Keterangan	Bulan																			
			Maret 2013				April 2013				Mei 2013				Juni 2013				Juli 2013			
1.	Persiapan	Penyusunan Proposal																				
		Pengumpulan Proposal																				
2.	Pelaksanaan	Pemeriksaan Proposal																				
		Bimbingan																				
		Pendaftaran Sidang																				
3.	Pelaporan	Pelaksanaan sidang																				
		Revisi sidang																				